

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S., 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Armia, M. S., 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh.
- Azwar, S., 2009, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Badriyah, S. M., 2016, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Danialsyah, Lubis, M. R., dan Siregar, G. T. P, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek*, 2023, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan.
- Fajar, M. dan Achmad, Y., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadrian, E. dan Hakim, L., 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Deepublish, Sleman.
- Halim, A. R., 1985, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Y., 2019, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hutagalung, S. M., 2011, *Praktik Peradilan Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, J., 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Disparitas Putusan Hakim: Identitas dan Implikasi*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024, *Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Lubis, M. S., 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung. hlm 6-9.

- Makarao, M. T., 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Manson, A., 2001, *The Law of Sentencing*, University of Toronto Press, Toronto.
- Marzuki, P. M., 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, S., 2012, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (edisi revisi)*. Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mertokusumo, S., 2021, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad, A., 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, R., 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta.
- Rasyid, L. M. dan Herinawati, 2015, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Aceh Utara.
- Retnowulan, S. dan Oeripkartawinata, I., 1997, *Hukum Acara Dalam Teori Dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Safira, M. E., *Hukum Acara Perdata*, 2017, CV. Nata Karya, Ponorogo.
- Santosa, M. A., 1997, *Hak Gugat Organisasi Lingkungan*, ICEL, Jakarta.
- Santosa, M. A., et al., 2016, *Membuka Akses Keadilan Melalui Citizen Law Suit (CLS) di Indonesia*, Prima Pustaka, Jakarta.
- Susanti, R. D. I., 2015, *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berbasis Lingkar Hermeneutika*, Indonesian philosophical Studies, Malang.
- Qamar, N., 2010, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Pustaka Refleksi, Makassar.

Jurnal

- Aulia, A., Ramadhan, G. R., Fauzi, M., Doorson, S., Diaz, Y., Siswajanthi, F., "Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata", *Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2024).

- Aurel, P., Deji, D., Wijaya, R. N., Halim, A. H., Simanungkali, M., & Halim, H. C. (2024). Alasan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul. *Prosiding SENAPAS*, Vol. 2, No. 1 (2024).
- Berliana, V., “Komparasi Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Hakim MA Dalam Perkara Warga negara (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 588/Pdt/2015/PT.DKI dan Putusan MA Nomor: 31 K/PDT/2017)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 3 (2020).
- Bustanil, M. dan Suyitno, I., “Faktor Berpengaruh Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Di Bidang Kepegawaian (Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar)”, *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1 (2016).
- Cheang, M., “Disparity of Sentencing”, *Malaya Low Journal*, (1997).
- Ismantara, S., “*Citizen Lawsuit: Pelindung Hak Konstituional Dalam Sistem Hukum Indonesia*”, *Jurnal Equitable*, Vol. 8, No. 2 (2023).
- Mahmudah, N., “Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat”, *Nizham*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2019).
- Mezak, M. H., “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,” *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5, No. 3. (Maret 2006).
- Nasir, C., “Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Warga negara”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4 (2017).
- Nasir, G. A., “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5, No. 2 (2017).
- Navisa, F. D., “Karakteristik Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2 (Agustus, 2020).
- Nurmedina, L., “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Warga negara Indonesia dan Amerika Serikat”, *Simbur Cahaya*, Vol. 28, No. 2, (Desember, 2021).
- Putra, I. G. A. K. B. W. A., Widiati, I. A. P., dan Ujjanti, N. M. P., “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Oktober, 2020).

- Putra, R. H., dan Hadiati, M., “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) di Pengadilan Dilihat dari Perspektif Hukum Acara Perdata”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2 (Desember, 2023).
- Sinaga, D. S., dan Syahputra, A., “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak”, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol 39, No 1 (Maret, 2023).
- Subekti, V. A. dan Marbun, R., “Kajian Yuridis Penerapan Turut Tergugat Dalam Gugatan Wanprestasi dan Sita Jaminan”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 5 (2022).
- Sugianto, I., “Hak Gugat Warga Negara (Warga negara) Terhadap Negara: Kajian Putusan No28/Pdt.G/2003/PN.JKT.Pusat,” *Jurnal Kajian Pustaka Pengadilan*, Vol. 2, No. 2 (2004).
- Sugianto, I., “Kasus Nunukan: Hak Gugat Warga Negara (Citizen Law Suit) Terhadap Negara”, *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum Masyarakat Menggugat*, Edisi 2 (2004).
- Tauda, G. A., “Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 31, No. 2, (2024).
- Zahriyah, Y., “Analisis Putusan di Lingkungan Pengadilan Agama (Antara Judex Facti dan Judex Juris)”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11, No. 2, (Agustus, 2022).

Hasil Penelitian dan Tugas Akhir

- Amalina, D. A. N., 2021, *Perbedaan implikasi hukum atas kedudukan tergugat dan turut tergugat bagi notaris dalam gugatan pembatalan akta hibah wasiat yang merupakan partij akta (studi putusan perbanding putusan nomor 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PN.Sby*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Arinawati, H., 2022, *Gugatan Pembatalan Perjanjian Oleh Pihak Ketiga Demi Kepentingan Umum Dalam Citizen Lawsuit: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Bjn*, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok.
- Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009,

Class Action dan Citizen Law Suit: Laporan Penelitian, hasil penelitian, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Prihandini, Y., 2009, *Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Sebagai Penerapan Doktrin Warga negara di Pengadilan (Studi Kasus Ujian Nasional, Perubahan Sistem Tarif Tol, Praperadilan Soeharto dan Judicial Review Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)*, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok.

Puruhita, A. R. R., 2024, *Air Bersih Di Negara Sebagai Hak Konstitusional: Studi Kasus Jakarta, Indonesia dan Amerika Serikat*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Naofal, N. A., 2020, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Akibat Murtad Di Pengadilan Agama*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Saputra, M. D., 2022, *Implementasi Kebijakan Pelaporan Pajak Restoran Melalui Situs E-SPTPD Ditinjau Dari Asas Akuntabilitas Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sari, E. P., 2019, *Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PT A.JK)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

Makalah dan Pidato

Nurdin, A., “Gugatan Warga negara”, Makalah, Seminar Penegakkan Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Gugatan Warga negara, Malang, 4 April 2005.

Artikel

Auli, R. C., “Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum”, Hukumonline.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penemuan-hukum-dan-konstruksi-hukum-lt62d13817f197e/> (22 Februari 2025)

Cahyono, Judicial Activism Hakim Peradilan Perdata: Perspektif Teori-Teori Penemuan Hukum, pn-sleman.go.id, 2022, <https://pn-sleman.go.id/2022/10/03/judicial-activism-hakim-peradilan-perdata-perspektif-teori-teori-penemuan-hukum/> (23 Februari 2025).

Kusumasari, D., “Apakah Penggugat Boleh Memilih Siapa Yang Hendak Digugatnya?”, Hukumonline.com, 2011, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-penggugat-boleh-memilih-siapa-yang-hendak-digugatnya--lt4e98042938638/> (diakses 2 Juni 2025).

Nafiatul Munawaroh, “Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, dan SK KMA”, Hukumonline.com, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/> (diakses 24 Januari 2025).

Peraturan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 121).

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM Jaya).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 453).

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 036/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75).

Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 118).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 119).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 3).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 perihal Kasasi perkara Djiauw Ho Hoa, 16 Juni 1971.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 437 K/Sip/1973, 9 Desember 1975.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982 perihal Kasasi perkara Saripah Ragwan Alatas, Et.al, 1 Agustus 1982.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst, 8 Desember 2003.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 480/Pdt/2005/PT.DKI, 4 April 2006.

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 55/PDT.G/2013/PN.SMDA, 16 Juli 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 527/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. perihal Pertama perkara Nurhidayah, 20 Februari 2015.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 588/PDT/2015/PT.DKI. perihal Banding perkara Nurhidayah, 12 Januari 2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pdt/2017, perihal Kasasi perkara Nurhidayah, 10 April 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST, perihal Pertama perkara Melanie Soebono, 16 September 2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XVIII/2020, perihal perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 6 Oktober 2020.